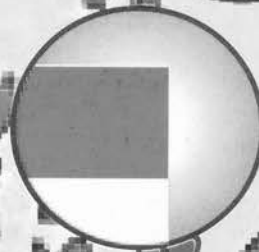


MANAJEMEN USAHAWAN

INDONESIA

ASEAN-CHINA FTA

- Pembentukan ASEAN-China FTA: Peluang bagi Perekonomian Indonesia**
 Zahrida Z. Wiryawan
- Pengaruh Variabel Makro terhadap Hubungan "Conditional Mean and Conditional Volatility" IHSG**
 Adler Haymans Manurung dan Widhi Indratmo Nugroho
- Customer Satisfaction and Behavioral Intentions**
 Wahyuningsih
- Orientasi Konsumen di Sektor Publik: Perspektif Pebisnis**
 Dwi Suhartanto dan Lusianus Kusdibyo
- Kerangka Konseptual, Perkembangan Teori, dan Aplikasi Marketing Mix pada Dekade 2000**
 Muhtosin Arief
- Paradigma Baru Pengukuran Efisiensi Kinerja Relatif Berbasis Pendekatan Matematik**
 Erwinta Siswadi dan R. Nugroho Purwantoro
- Secara Legal, Bolehkah Tax Avoidance?**
 Abdul Halim





Catalog PROGRAM PENDIDIKAN & PELATIHAN MANAJEMEN PROFESIONAL

MANAJEMEN PEMASARAN

Manajemen Pemasaran Terpadu

Konsep STP, Marketing Mix, Marketing opportunities, Marketing strategic, Kualitas pelayanan konsumen, Komunikasi pemasaran.

Penelitian Pemasaran

Desain penelitian pemasaran, Metode pengumpulan data, Pemrosesan data, Analisis data, aplikasi penelitian pemasaran, Penulisan laporan penelitian pemasaran.

Strategi membangun Pelayanan Prima

Excellent customer service, Serqual, Switching paradigm, Service gap, Service blue-print, Pengembangan pribadi, Service game.

Analisa Pasar dan Konsumen

Pengukuran Permintaan Pasar dan Analisa Lingkungan Pasar, Analisa Customer & Business Market, Analisa Perilaku Konsumen, Penentuan Target Pasar.

Competitive Strategies

Conventional Strategies, Generic Competitive Strategies, Niche Strategy, Substitution Strategy, Free-Riding Strategy, Strategic Moves, Strategic Alliances, Choosing the right Strategy.

Pemasaran Untuk Non-Pemasar

Pengertian manajemen pemasaran, Segmentasi, Target Market, Positioning, Bauran pemasaran, Strategi pemasaran untuk memenangkan Persaingan.

Strategi Promosi

Pengertian promosi, Bauran promosi, Promosi sebagai bagian manajemen pemasaran, Promosi yang efektif, Menyusun strategi promosi untuk memenangkan persaingan.

MANAJEMEN PRODUKSI / OPERASI

Sistem Perencanaan Produksi

Demand management & forecasting, Sales & operation planning, MRP, ERP, Creating production plan, Master Scheduling, Developing MPS, Bill of Material, Capacity planning process, Scheduling Orders.

Project Management

Overview manajemen proyek, Perencanaan proyek, Pelaksanaan proyek, Pengendalian Proyek.

Inventory Management and Warehouse Management

ABC analysis, Inventory management for Independent item, Warehousing management, Inventory record accuracy, Physical Distribution System, Transportation, Packaging, Material Handling.

MANAJEMEN STRATEGIK

Workshop Business Plan

Format rencana bisnis, Analisis pasar, Analisis produk, Rencana pemasaran, Rencana operasi, Rencana SDM, Simulasi komputer

Workshop Corporate Plan

Model dasar corporate plan, Proses manajemen strategis, Analisis eksternal dan internal, Posisi perusahaan, Strategic initiative, Penyusunan target keuangan, Simulasi komputer.

MANAJEMEN MUTU

Implementasi Quality Control Circle

Pengenalan QCC, Prasyarat pelaksanaan QCC, Sistematisasi pelaksanaan QCC, Tool dalam melakukan quality improvement (QC 7 tools), Implementasi QCC.

Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2000

Proses bisnis organisasi, Model dokumentasi berbasis ISO 9001:2000, Prosedur wajib ISO 9001:2000, Pedoman mutu, Prosedur mutu, Dokumen pendukung, Latihan dan Kasus.

TOPIK KHUSUS

360° Feedback untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi

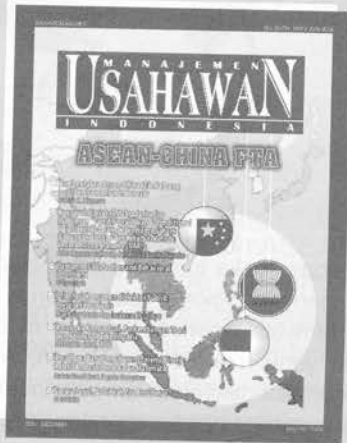
Konsep dasar 360° Feedback, Penggunaan 360° Feedback untuk Strategic Change, Pemilihan metode pengumpulan feedback, Implementasi 360° Feedback untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pembahasan Kasus.

Penggunaan Data Envelopment Analysis (DEA) - Frontier dalam Proses Pengambilan keputusan Bisnis

Pengenalan DEA sebagai pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan, Identifikasi dan pemetaan permasalahan, Implementasi DEA-frontier dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan, Analisis Hasil.

Penggunaan Data Envelopment Analysis (DEA) - Frontier dalam Proses Evaluasi Kinerja dan Identifikasi Inefisien

Pengenalan DEA sebagai metode pengukuran tingkat produktivitas komparatif unit organisasi, Pemetaan tingkat produktivitas unit organisasi, Implementasi DEA-frontier dengan mengukur tingkat produktivitas komparatif unit-unit organisasi, Analisis Hasil.



<p>■ Pembentukan ASEAN-China FTA: Peluang bagi Perekonomian Indonesia Zahrida Z. Wiryawan.....</p>	<p>✓ 3</p>
<p>■ Pengaruh Variabel Makro terhadap Hubungan "Conditional Mean & Conditional Volatility" IHSG Adler Haymans Manurung dan Widhi Indratmo Nugroho.....</p>	<p>13</p>
<p>■ Customer Satisfaction and Behavioral Intentions Wahyuningsih.....</p>	<p>23</p>
<p>■ Orientasi Konsumen di Sektor Publik: Perspektif Pebisnis Dwi Suhartanto dan Lusianus Kusdibyo.....</p>	<p>29.</p>
<p>■ Kerangka Konseptual, Perkembangan Teori, dan Aplikasi Marketing Mix pada Dekade 2000 Muhtosin Arief.....</p>	<p>36</p>
<p>■ Paradigma Baru Pengukuran Efisiensi Kinerja Relatif Berbasis Pendekatan Matematik Erwinta Siswadi dan R. Nugroho Purwantoro.....</p>	<p>44</p>
<p>■ Secara Legal, Bolehkah Tax Avoidance? Abdul Halim.....</p>	<p>49</p>
<p>■ Resensi Jurnal : Creating Local Brands in Multilingual International Markets.....</p>	<p>54</p>
<p>■ Resensi Buku L: Chnage!.....</p>	<p>56</p>

PELINDUNG

Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, (Dekan FEUI)

PEMIMPIN UMUM

Dr. Ruslan Prijadi

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Dr. Budi W. Soetjipto

PEMIMPIN REDAKSI

Willem A. Makaliwe

SEKRETARIS REDAKSI / USAHA

Esther S. Astuti S.A.

REDAKTUR AHLI

Prof. Dr. Wagiono Ismail;
Prof. Dr. Sofjan Assauri;
Dr. Djunaedi Hadisumarto;
Dr. Kresnohadi Ariyoto;
Dr. Surya Dharma.

REDAKTUR

Ferdy S. Nggao;
I. Sulistyarini Salim;
Rizqiah Insanita.

PRODUKSI

Mohammad Syakir

SIRKULASI

Subaryo; Jaka Sanwani

SEKRETARIAT

Hadi Surahman

ALAMAT REDAKSI

Lembaga Management FE-UI

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta
Telepon (062)(21) 31934142, 3907410
Facsimile (062)(21) 31931610,
E-mail : usahawan@lm.feui.org
usahawan_lmfeui@yahoo.com
Website : www.lmfeui.com

Bank BNI Cab. Kramat, No. Rek.0010539802
a.n Lembaga Management FEUI

No. 01604/SK/DTJEN, PPG/STT/1990

SIC : Kep. 096/p.c/1971

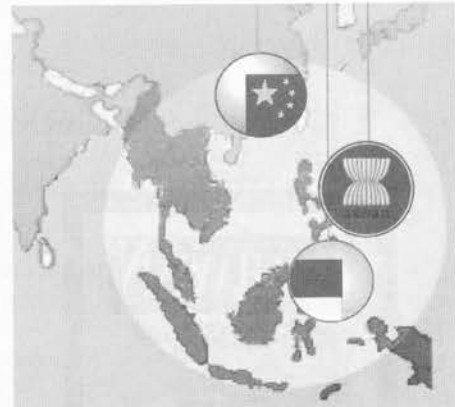
ISSN : 0302-9859

MANAJEMEN & USAHAWAN INDONESIA

Adalah media bulanan yang bertujuan memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan manajemen, guna meningkatkan daya dan hasil perusahaan/organisasi di Indonesia. Artikel yang dimuat mengutamakan penerapan dan adaptasi ilmu manajemen dalam masyarakat. Media ini ditujukan kepada para usahawan swasta maupun pemerintah, manajer, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang menaruh minat atas pengetahuan manajemen. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Setiap tulisan yang dimuat menjadi hak media ini dan setiap tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko secukupnya.

Pembaca yang Budiman,

Berbicara mengenai perdagangan bebas, timbul pro dan kontra di dalamnya, apakah memang perdagangan bebas ini akan meningkatkan kesejahteraan atau malah menimbulkan kerugian bagi negara yang bersangkutan. Secara teori, perdagangan bebas ini berarti kemudahan bagi negara-negara di dalamnya untuk mengadakan kegiatan ekspor dan impor antar negara tersebut. Tetapi ada anggapan bahwa bila kesepakatan ini terjadi, akan menguntungkan hanya bagi negara maju. Berangkat dari adanya keinginan untuk mengambil manfaat dari perdagangan bebas, maka tumbuh berbagai macam kesepakatan maupun pembentukan blok perdagangan regional salah satunya AFTA untuk negara Asean. Kesepakatan AFTA ini ternyata diperluas dengan mengajak China masuk menjadi anggotanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan; Apakah dengan pembentukan Asean-China FTA ini akan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak dengan keikutsertaan China ke dalam AFTA? Untuk menjawab pertanyaan ini, diulas dengan lugas dan menarik dalam tulisan Zahrida Z. Wiryawani, sebagai tulisan utama Usahawan kali ini.



Selain tulisan utama, edisi ini menyajikan tiga tulisan di bidang pemasaran. Wahyuningsih menulis mengenai '*Customer Satisfaction and Behavioral Intentions*'. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepuasan konsumen yang tinggi akan mendorong konsumen untuk membeli kembali produk perusahaan dan menginformasikan hal yang positif tentang produk dan perusahaan kepada orang lain. Dwi Suhartanto dan Lusianus Kusdibyo melengkapi topik pemasaran dengan tulisannya Orientasi Konsumen di Sektor Publik, dari persepsi pengusaha/ bisnis. Dan terakhir tulisan dari Muhtosin Arief menulis mengenai "Kerangka Konseptual, Perkembangan Teori dan Aplikasi Marketing Mix".

Bagi pembaca yang tertarik dengan informasi dari lantai bursa, bisa membaca tulisan dari Adler Manurung dan Widhi Indratmo yang memanfaatkan data IHSG periode Januari 1997 hingga Desember 2004 dan data lainnya yang terkait. Sehingga menghasilkan tulisan Pengaruh Variabel Makro Terhadap Hubungan '*Conditional Mean & Conditional Volatility*' di dalam IHSG dengan Pendekatan Metode VAR. Edisi kali ini juga menampilkan dua tulisan mengenai penilaian kinerja, yaitu dari Erwinta Siswadi dan Nugroho Purwantoro serta Abdul Halim. Resensi jurnal dan resensi buku tidak lupa hadir untuk menambah wawasan dan informasi bagi pembaca.

Pembaca, kami menyadari bahwa keberadaan Usahawan lebih dari 30 tahun tidak terlepas dari dukungan pembaca. Pembacalah yang menjadi pendorong bagi Tim Redaksi untuk terus bekerja keras menghasilkan karya yang terbaik. Masih banyak hal-hal penting yang harus diperbaiki seperti menyajikan topik-topik yang bermutu dan tidak ketinggalan jaman, meniadakan kesalahan penulisan, ketepatan waktu penerbitan. Untuk itu, kami Redaksi Usahawan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2005 mengadakan Rapat Kerja bertempat di Lembaga Management FEUI, Salemba. Rapat Kerja ini diharapkan bisa menghasilkan ide-ide baru demi kemajuan Usahawan yang tercinta ini, Amin.

Selamat membaca!

Pembentukan Asean-China FTA: Peluang bagi Perekonomian Indonesia

Zahrida Z. Wiryawan

Abstract

Recently, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) signed a comprehensive economic partnership agreement with China during the tenth ASEAN Summit in Vientiane, Laos. This was the first Free Trade Agreement between a regional grouping and a state in the East Asian region, and it was a stepping stone towards the creation of other similar agreements involving ASEAN and other East Asian countries, namely Japan and South Korea. More countries have expressed willingness to follow suit. Despite the enthusiasm expressed by the policy-makers and members of the academic community in Indonesia towards the pursuit of this form of foreign trade policy, there are a number of issues that have to be assessed prior to embarking on such a trade agreement. Moreover, in a case where an FTA involves a more developed country and a poorer country, and given the relatively weak bargaining position of the latter, it is likely that the more developed country will jeopardise the outcome of the negotiation. This article attempts to exercise and examine whether this type of trade policy would serve the actual needs and interests of the Indonesian public.

Keywords : ASEAN, Free Trade Agreement, Indonesia, perdagangan internasional

Yang dimaksudkan dengan 'Free Trade' atau perdagangan bebas dalam khasanah teori ekonomi internasional adalah sebuah kebijakan umum (*public policy*) dimana negara dilarang mempengaruhi apalagi menghambat apa yang warganya ingin membeli dari negara lain (impor), ataukah ingin membuat serta kemudian menjual (ekspor) barang dan jasa ke negara lain, melalui mekanisme kuota maupun bea

masuk yang terlalu tinggi (Hill, 2003). Adam Smith, melalui teori yang ditulisnya dalam "An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" (1776), adalah orang yang pertama kali dalam sejarah perekonomian modern yang berpendapat bahwa perdagangan bebas akan mendatangkan manfaat bagi sebuah negara.

Secara ringkas, Adam Smith (1776/1986) berargumen bahwa mekanisme kebebasan pasarlah yang menentukan apa yang baik untuk diimpor ataupun diekspor oleh sebuah negara ketimbang peraturan pemerintah. Pemikiran Adam Smith ini menciptakan konsep baru teori perdagangan internasional berupa mazhab Klasik, setelah sebelumnya

(sekitar abad ke 16) didominasi oleh konsep yang dikenal dengan istilah 'merkantilisme' dengan teori agar negara berusaha untuk mengekspor sebanyak mungkin sekaligus juga membatasi impor. Dalam sejarah ekonomi, pemikiran Adam Smith sebagai 'sang pelopor' dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh teori komparatif Ricardo (1815) di awal abad ke 19, serta oleh Eli Heckscher serta Bertil Ohlin di awal abad ke 20 yang dikenal dengan 'teorema Heckscher-Ohlin' (Robock, Simmonds dan Zwick, 1977). Dalam perkembangan, muncul konsep-konsep baru teori perdagangan internasional, seperti Vernon, Dunning, Krugman, serta yang kini dikenal luas misalnya Porter (Griffin dan Pustay, 2002; Hill, 2003).

Saat ini, hampir semua perekonomian (*economies*) terlibat dalam perdagangan internasional karena sektor perdagangan internasional merupakan penghubung perekonomian dalam negeri dengan luar negeri. Penghubung ini berlaku sebagai saluran pengantar kegiatan ekonomi dari suatu perekonomian ke perekonomian lainnya, dan menciptakan jaringan saling-tergantungan (*channel of interdependence*) di antara berbagai perekonomian di dunia.

Diskusi mengenai peran perdagangan internasional dalam proses pembangunan ekonomi berkisar sekitar empat pandangan yang berlaku umum, yaitu:

1. Pertama ialah pandangan yang bersifat optimistis, yang antara lain diungkapkan oleh Diaz-Alejandro (1975) sebagai pernyataan insidental (*obiter dicta*) yang cenderung sangat pro-perdagangan. Menurut paham ini, kesejahteraan semua pihak yang melakukan perdagangan internasional akan meningkat, meskipun dilakukan antara negara maju dengan

Zahrida Z. Wiryawani., Dosen Tetap pada Fak. Ekonomi Univ. Tarumanagara di Jakarta

- negara yang berpendapatan rendah. Pandangan yang bersumber dari pemikir mazhab Klasik (Adam Smith, David Ricardo) ini amat menekankan pentingnya persaingan bebas dengan semboyan *laissez faire, laisser passer* (Sumitro Djojohadikusumo, 1991)
2. Pandangan kedua masih tetap mengandung banyak ortodoksi teori perdagangan internasional namun lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kebijaksanaannya (*policy prescription*). Paham ini beranggapan bahwa distorsi pasar dalam perdagangan bebas menyimpulkan bahwa perdagangan bebas tidak merupakan satu-satunya kebijakan yang terbaik serta tidak pula serta-merta akan menaikkan kesejahteraan negara-negara tersebut. Menurut paham ini, perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka akan menimbulkan kesengsaraan atau memperendah kesejahteraan (Bhagwati dan Srinivasan, 1979; Sritua Arief, 2001)
 3. Pandangan ketiga mencoba melukiskan bagaimana struktur ekonomi negara-negara industrialis maju menyebabkan mereka cenderung memperoleh keuntungan dalam perdagangan, sekaligus menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara-negara yang sedang berkembang yang memiliki struktur ekonomi berbeda. Alih-alih mendatangkan kemajuan ekonomis secara bertahap, mulus dan berkesinambungan, paham ini menyatakan bahwa perdagangan internasional bebas ini akan menimbulkan konflik dan ketidak-seimbangan (*dis-equilibrium*). Selain tidak menimbulkan efek menetes ke bawah (*trickle-down*) yang diharapkan, juga akan menimbulkan kemunduran di negara-negara sedang berkembang (Cardoso dan Faletto, 1970; dos Santos, 1973; Prebisch, 1959)
 4. Pandangan keempat dan (kini dianggap) mutakhir ialah pandangan yang kembali menganut pola perdagangan bebas yang dipelopori oleh traktat maupun konvensi yang dimulai oleh GATT/WTO (Kartadjoemena, 1996) dan kemudian 'melahirkan'

istilah globalisasi perdagangan dunia dan menjadi tema sentral kebijakan perdagangan di negara-negara industri maju maupun di negara-negara sedang berkembang. Selain WTO, paham neo-liberalis ini juga melahirkan aneka macam kesepakatan maupun pembentukan blok perdagangan regional seperti AFTA (ASEAN), NAFTA, Uni Eropa, MERCOSUR dll.

Dalam kurun pasca perang dingin sekarang ini, perdagangan dunia secara keseluruhan tumbuh lebih cepat daripada *out-put* dunia. Perekonomian Asia Timur, minus Jepang, misalnya, diprediksikan bakal tumbuh dengan lebih dari 7 persen (Hrvoje Hranski, 2004) Dengan kata lain, berbagai negara menjadi lebih terbuka dan sekaligus menjadi lebih saling tergantung antara kelompok negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, maupun dengan sesamanya.

Pada hakekatnya, aktor-aktor neo-liberalisme ekonomi yang menjadi pelaku perdagangan internasional pasca perang dingin terdiri dari lembaga-lembaga keuangan internasional berupa *International Financial Institution, World Bank, Multilateral Development Bank* dengan ujung-tombak pelaksanaannya para *Multi National Corporations/MNCs*. Lembaga-lembaga keuangan internasional inilah yang melancarkan program liberalisasi pasar, pencabutan subsidi pemerintah, privatisasi aset domestik nasional, melalui mekanisme peraturan-perundangan nasional berbentuk *Intellectual Property Rights/TRIP, Trade Related Investment Measures/TRIM* dsb guna menciptakan jalan agar para MNCs leluasa memasuki pasar negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang diterpa krisis ekonomi yang memerlukan bantuan keuangan. Selanjutnya, para MNCs secara gencar menawarkan produk-produk berlabel internasional demi kepentingan MNCs itu. Secara langsung tercipta gejala konsumerisme lewat iklan serta promosi bertubi-tubi melalui media-masa (lihat Gambar 1)

Dalam konteks inilah, pada akhir Nopember 2004 di Vientiane, Laos, 10 negara-negara Asia Tenggara yang bergabung dalam ASEAN menorehkan sejarah baru menandatangani perjanjian

perdagangan pembuka jalan terbentuknya kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia (Harmsen, 2004a). Dimulai tahun 2005, ASEAN dan China sepakat menurunkan hambatan tarif dan non-tarif sejumlah produk mereka. Selain itu, juga disepakati untuk membangun dan memperbaiki jalan raya dari Singapura hingga mencapai daratan China.

Arah kesana sudah ada, yaitu rencana pembangunan jalur kereta api dari Kunming di China hingga ke Yangon dan Myitkyna di Myanmar. Rencana lain ialah peningkatan kondisi jalan mobil berikut pembangunan jalur kereta api baru dari propinsi Yunnan (China) ke Vietnam, Laos dan Myanmar. Studi juga akan dilakukan terhadap pengembangan jalur kereta api yang masih terputus antara Pnom Penh dan Loc Ninh dan jalur terputus lainnya di Kamboja. Itu bagian dari rencana perhubungan darat (mobil dan kereta api) yang akan dibangun antara Singapura hingga Kunming.

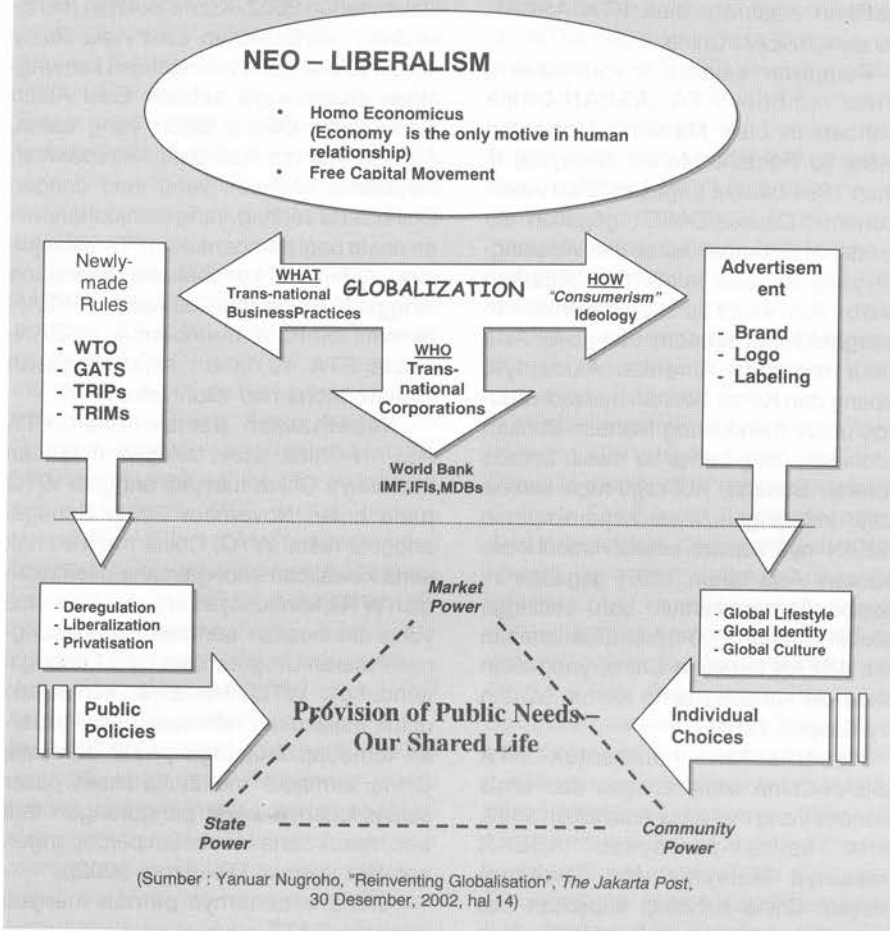
Semua yang dituangkan dalam kesepakatan itu dinilai sebagai awal dari terbentuknya blok perdagangan seperti Uni Eropa (EU) dan Amerika Utara (NAFTA)

Asean-China Free Trade Agreement/FTA

Pembentukan ASEAN-China FTA merupakan langkah awal rencana kesepakatan pembentukan FTA yang lebih luas meliputi ASEAN, Jepang, Korea dan China, yang dikenal dengan istilah ASEAN + 3 (Wiryawan, 2004). Pembentukan kerjasama perdagangan bebas FTA ASEAN + 3 itu direncanakan berdasarkan besarnya GDP gabungan dari tiga negara-negara itu, yaitu US\$ 6 trilyun (2003). GDP sebesar itu setara dengan dua-pertiga GDP Uni Eropa, atau 60 persen GDP negara-negara yang tergabung dalam NAFTA (US\$ 11 trilyun) (Ohn Ki-Un, 2004). Perundingan perluasan FTA dengan Jepang serta Korea direncanakan dilakukan awal tahun 2005.

Kesepakatan atau pakta ASEAN-China FTA, secara khusus akan (1) melakukan liberalisasi hambatan tarif serta non-tarif perdagangan barang, (2) menyetujui mekanisme penyelesaian sekiranya timbul sengketa dagang (*mechanism to resolve trade dispute*), dan (3) pembentukan rencana komprehensif

Gambar 1 THE CONCEPT OF GLOBALIZATION IN THE BORDERLESS WORLD



untuk sepenuhnya melakukan liberalisasi barang serta jasa pada tahun 2010. Pakta ini, kelak, diprediksikan bakal menaikkan perdagangan ASEAN-China secara timbal-balik dengan 28 persen tahun depan, dari US\$ 78.2 milyar (2003) menjadi US\$ 100 milyar tahun 2005, sehingga ASEAN tidak lagi terlalu bergantung kepada negara-negara Barat sebagai mitra-dagang utama seperti yang selama ini terjadi. Sebagai perbandingan, nilai perdagangan tahunan ASEAN-AS sekitar US \$ 120 milyar, sementara ASEAN-Uni Eropa US \$ 110 milyar.

Tujuan utama diharapkan bisa terlaksana setelah tingkat bea masuk antara negara-negara peserta berhasil diturunkan menjadi 0 persen hingga 5 persen maksimum. Walau prosesnya masih memerlukan waktu yang lama, kese-

pakatan FTA ASEAN-China menurunkan tarif menjadi di bawah 5 % hingga tahun 2010, memberi waktu ekstra dua tahun (2012) untuk produk mahal seperti mobil guna diperdagangkan secara bebas, dan memberi waktu sampai tahun 2015 bagi Kamboja, Laos, Myanmar serta Vietnam untuk ikut serta. Setelah tahun 2010, sektor jasa pun akan diliberalisasi guna memperlancar perdagangan.

Kesepakatan yang dituangkan dalam "Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China", ternyata memberikan dampak ikutan sehingga negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Australia serta Selandia Baru ingin pula bergabung. Negara lain lagi seperti India dan Rusia,

walau juga berminat, belum memberikan kepastian kapan akan ikut bergabung membentuk FTA bersama (Ivy Susanti, 2004; Ong Keng Yong, 2004)

Bahkan Ong Keng Yong (2004), Sekretaris Jendral ASEAN, menegaskan bahwa target US\$ 100 milyar merupakan target yang mudah dicapai pada waktunya, mengingat pada tahun 2003 saja nilai perdagangan antara ASEAN dan China sudah melebihi nilai US\$ 79 milyar. Sementara itu, pertumbuhan perdagangan di China serta pertumbuhan PDB negara-negara ASEAN memberikan indikator dukungan terhadap target kuantitatif itu.

Secara internal, ASEAN memberlakukan kesepakatan "Vientiane Action Program/VAP" guna meneruskan pelaksanaan "Bali Concord II" (lihat a.l. Wiryawan dan Wiryawan, 2003 mengenai Bali Concord II), maupun untuk mengurangi perbedaan di bidang perkembangan ekonomi sesama anggota ASEAN pada tahun 2010. VAP mengandung langkah-langkah kongkrit lintas sektoral lengkap dengan perangkat yang dibutuhkan.

Secara khusus juga terdapat klausula berupa "early harvest arrangement" yang membuka peluang bagi beberapa negara yang telah siap untuk segera melaksanakan kesepakatan FTA tsb. Thailand misalnya, telah memperoleh peluang untuk memasarkan produk agrikulturnya memasuki pasar China dengan tarif bea masuk yang sangat rendah (Harmsen, 2004a) sebagai bagian dari program ini.

Sekiranya FTA ASEAN plus China dapat direalisasikan dengan mulus, FTA ini berpenduduk lebih dua milyar berbanding misalnya dengan Uni Eropa (379 juta) ataupun NAFTA (454 juta), dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7.9 percent menurut Bank Dunia, walaupun terdapat skenario konservatif pula akibat turbulensi ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan tajam harga minyak bumi beberapa waktu yl. Meskipun demikian, desain FTA ASEAN-China tidak diarahkan kepada pembentukan integrasi ekonomi paripurna seperti pada Uni Eropa, yang kemudian membentuk sistem organisasi inter-negara supranasional berupa Pemerintahan Uni Eropa lengkap dengan Presiden, Dewan Menteri dan Parlemen Eropa, berikut perangkat

Kedubesnya di banyak negara termasuk Indonesia. Juga, tidak ada desain untuk membentuk mata-uang tunggal seperti *Euro* di Uni Eropa dalam skenario FTA ASEAN-China.

Bahkan dalam tataran ASEAN, walaupun sasarannya ialah pembentukan suatu *customs union*, dimana selain dilakukan pengurangan/penghapusan bea masuk juga akan diberlakukan tarif tunggal bersama atas produk dari luar kawasan ASEAN (Hill, 2003), tidak ada rencana untuk memberlakukan sebuah sistem mata-uang tunggal seperti di Uni Eropa. Sikap ini bisa dipahami mengingat memberlakukan sistem mata-uang tunggal merupakan langkah yang amat sangat kompleks, dilematis, dan karenanya akan susah memperoleh konsensus sebab akan terkait pula dengan kemauan politik sebuah negara untuk menyerahkan sebagian wewenangnya kepada sebuah lembaga/pemerintahan super.

Perbedaan sistem politik ASEAN yang begitu besar — ada di antaranya bahkan yang tidak memiliki demokrasi sama sekali, bakal mendatangkan kesulitan untuk memberlakukan sistem mata-uang tunggal ASEAN. Keterbatasan sistem politik itupun tidak memungkinkan ASEAN untuk menerapkan kebijakan yang dikenal dengan *free movement of labour and capital*, guna menciptakan kondisi kondusif bagi pembentukan basis produk manufaktur bersama yang menjadi ciri khas sistem ekonomi terintegrasi seperti Uni Eropa. Nampaknya, terdapat kekuatiran dari beberapa negara tertentu dalam ASEAN bahwa persaingan yang sangat intensif (khusus di bidang sumberdaya manusia serta kapital/finansial) membuat mereka kalah bersaing dengan sesama anggota ASEAN lain (Ivy Susanti, 2004).

Tanpa adanya desain ataupun skenario untuk: (1) *free movement of labour and capital*, (2) memberlakukan basis produk manufaktur bersama, (3) memberlakukan mata-uang tunggal, maka FTA ASEAN maupun ASEAN-China hanya ditujukan untuk melakukan ekspansi pasar sebagai agenda utama, bahkan mungkin sebagai **satu-satunya** agenda. Sudah bisa diperkirakan bahwa rencana perluasan pasar (*market extention*) seperti itu akan mengalami

hambatan serius dari negara-negara ekonomi maju yang tidak tinggal diam sekiranya pasar tradisional mereka dijadikan 'sasaran' oleh FTA ASEAN maupun ASEAN-China.

Pelajaran sejarah menunjukkan, ketika embrio FTA ASEAN-China dilancarkan oleh Mahathir Mohamad (ketika itu Perdana Menteri Malaysia) di tahun 1994 berupa gagasan "*East Asian Economic Caucus/EAEC*", gagasan tsb mendapat tentangan keras dari Washington yang merasa khawatir pembentukan kaukus Asia Timur itu akan melemahkan ketergantungan ekonomi dan politik Asia Timur terhadap Amerika. Akibatnya, Jepang dan Korea Selatan menjadi ragu-ragu untuk mendukung Mahatir. Bahkan Indonesia, yang ketika itu masih berada dibawah Suharto, ikut ragu-ragu karena khawatir kehilangan 'kursi kepemimpinan ASEAN'-nya. Barulah setelah timbul krisis ekonomi Asia tahun 1997, gagasan ini memperoleh momentum baru sehingga setelah 10 tahun (2004) bisa dilaksanakan oleh ASEAN bersama China, yang akan diikuti oleh Jepang serta Korea Selatan (Ivy Susanti, 2004).

Keberhasilan membentuk FTA ASEAN-China tidak terlepas dari krisis ekonomi yang menerpa Asia tahun 1997, serta ketidakpercayaan ASEAN (misalnya Malaysia dan Thailand) maupun China terhadap kebijakan dari *International Monetary Fund/IMF* untuk membantu mereka keluar dari krisis ekonomi yang cukup dahsyat. Penolakan Washington dan *IMF* terhadap gagasan yang diprakarsai oleh Jepang untuk mendirikan *Asian Monetary Fund/AMF* guna menyelamatkan perkenomian Asia memicu ASEAN beserta China, Korea Selatan dan Jepang untuk menciptakan mekanisme penyelamatan diri (*self-help mechanism*), berdiri di atas kaki sendiri. Secara bertahap, mulai tahun 1998, negara-negara tsb mengeluarkan pernyataan bersama untuk menyelenggarakan kerjasama regional yang erat di bidang pengembangan perekonomian, termasuk bidang kerjasama finansial.

Di Chiang Mai (2000), dalam kesepakatan *Chiang Mai Initiative*, menteri keuangan ASEAN, China, Korea dan Jepang mulai memberlakukan sistem swap mata-uang diantara mereka sebagai

langkah awal kerjasama finansial, termasuk monitoring arus modal, pengawasan regional maupun pelatihan manajerial. Dalam tahun 2002, Korea Selatan mengusulkan pembentukan *East Asia Study Group/EASG* guna mempelajari kemungkinan dibentuknya sebuah *East Asian Community*. Dalam tahun yang sama, ASEAN menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi yang luas dengan China serta Jepang, yang menjadi landasan dasar bagi pembentukan FTA selanjutnya. Akhirnya, kesepakatan Vientiane tanggal 29 Nopember 2004 dalam ASEAN Summit berhasil membentuk ASEAN-China FTA 10 tahun sejak gagasan Mahatir Mohamad diluncurkan.

Keberhasilan pembentukan FTA ASEAN-China tidak terlepas pula dari masuknya China menjadi anggota WTO pada bulan November 2001. Sebagai anggota resmi WTO, China memiliki hak serta kewajiban sebagaimana ditentukan oleh WTO, khususnya konvensi-konvensi yang dirumuskan semasa berlangsungnya Putaran Uruguay oleh GATT sebagai pendahulu WTO. Misalnya, keharusan untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap tataniaga pasar domestik China, termasuk membuka akses pasar seluas-luasnya lewat pengurangan tarif bea masuk serta hambatan perdagangan non-tarif lainnya. (Tongzon, 2002).

China sebenarnya pernah menjadi anggota GATT, namun mengundurkan diri pada tahun 1950 setelah terjadinya revolusi Oktober 1949 yang menciptakan negara dengan sistem sosialis yang tidak menyukai sistem perdagangan bebas. Kemudian China meminta izin untuk kembali menjadi anggota GATT pada tahun 1986, dan sejak itu menjalankan reformasi perdagangan secara besar-besaran dari ekonomi sosialis menjadi pro-pasar guna memenuhi permintaan GATT/WTO, selama berlangsungnya Putaran Uruguay (1986-1993). Barulah pada November 2001 usaha China berhasil dengan diterimanya negara itu (kembali) menjadi anggota WTO (Tongzon, 2002)

Sebagai anggota WTO, China berhak sepenuhnya untuk diperlakukan setara dengan negara-negara anggota WTO lain, dan tidak boleh terdiskriminasi oleh apapun serta oleh siapapun, sesuai

prinsip WTO berupa *treatment for one means treatment for all*. China misalnya berhak untuk memperoleh pengakuan *Most Favoured Nation/MFN* dari A.S sehingga produk China bisa masuk ke pasar A.S tanpa distorsi. Demikian pula, produk China bisa memasuki pasar Uni Eropa, pasar Jepang, ASEAN, Australia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan WTO yang melarang hambatan atas dasar tarif maupun hambatan non-tarif, seperti kuota perdagangan dsb.

Sekiranya ada negara yang menghambat masuknya produk China, sebagai anggota WTO China berhak mengajukan gugatan ke WTO, dan WTO berkewajiban melakukan investigasi terhadap keabsahan gugatan China, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika gugatan itu terbukti benar. Indonesia, sebagai anggota WTO, terikat dengan ketentuan WTO, sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk mengambil langkah yang dapat ditafsirkan sebagai menghambat masuknya produk China, terkecuali atas dasar ketentuan-ketentuan yang memang disahkan oleh WTO sebagai pengecualian.

Sebagai contoh, Malaysia telah meminta agar untuk sementara waktu produk otomotif impor tidak dibebaskan memasuki pasar Malaysia, dengan menggunakan klausula *infant industry*. Untuk itu, Malaysia harus mendeklarasikan niatnya kepada WTO sambil memberikan perkiraan waktu berapa lama status itu akan diberlakukan. Atas dasar klausula itu pula, industri otomotif belum dibebaskan dalam skema CEPT ASEAN dan Malaysia tetap memberlakukan bea masuk tinggi sebagai proteksi dengan sepengetahuan WTO.

Contoh mutakhir lain ialah klausula pengamanan perdagangan (*safeguard*), yang menurut rencana akan diberlakukan oleh A.S terhadap produk tekstil buatan China sebagai peredam potensi gangguan di pasar A.S. *Safeguard* diwujudkan dengan mengenakan bea masuk tambahan sehingga produk tekstil China di A.S menjadi lebih mahal dan tidak terlalu menjadi pesaing produk tekstil A.S sendiri selepas berakhirnya ketentuan pemberlakuan kuota perdagangan tekstil pasca perjanjian MFA (*Media Indonesia*, 24 Des 2004)

Jika sebuah negara secara *unilateral* memberlakukan ketentuan diskriminatif menghambat masuknya produk negara lain secara bertentangan dengan ketentuan WTO, negara lain yang dirugikan bisa mengambil langkah reaktif/retaliatif dengan memberlakukan hambatan serupa. Jika misalnya Indonesia membatasi masuknya produk dari negara A, maka negara A boleh pula menghambat masuknya produk asal Indonesia ke negara A itu selain dari membuat pengaduan kepada WTO. Produk yang terkena tindakan retaliasi biasanya produk yang paling banyak diekspor Indonesia ke negara A sehingga akan sangat merugikan Indonesia.

Sejak membuka diri terhadap investor asing, China berhasil menarik *Foreign Direct Investment/FDI* dalam skala besar. Ekonomi China tumbuh rata-rata dengan 9-10 % tiap tahun. China berhasil menjadi negara ke empat dalam perdagangan internasional, bahkan telah mampu menjadi negara nomor 3 setelah A.S dan Jepang dalam hal kekuatan ekonomi. Produksi baja China 20 kali lipat lebih besar dari produksi baja Uni Eropa; China mengkonsumsi lebih dari 40 % semen dunia dan menjadi negara terbesar ketiga pasar kendaraan bermotor. Selain itu, China menjadi 'kreditor' yang lumayan besar bagi A.S sebab China memegang T-bond (surat hutang) dari pemerintah A.S dengan nilai ratusan milyar US \$. (Garten, 2004)

Walaupun usaha-usaha telah dilakukan China guna mencegah *overheating* perekonomian dengan menahan laju pertumbuhan melalui pengurangan investasi serta pengetatan pemberian kredit perbankan, China masih menerima FDI dalam jumlah besar (Harmsen, 2004b). Sampai bulan Oktober 2004, China menerima US \$ 53.8 milyar, dan untuk seluruh tahun 2004 diprediksi total FDI yang memasuki China menjadi US \$ 60 milyar. Sampai dengan tahun 2003, total penerimaan FDI China sejak membuka diri terhadap FDI asing bernilai US \$ 545.03 milyar.

Setelah tujuan FDI lapis I (Shanghai, Guangzhou, Xiamen, Zuhai, Shantou dan Hainan), China kini membuka tujuan FDI lapis II dengan kota-kota seperti Suzhou, Tianjin, Chengdu dan Chongqing dengan

memberlakukan *Special Economic Zones/SEZ* dengan fasilitas bebas bea masuk, disamping ada juga ketentuan *Free Trade Zone/FTZ* dimana pemerintah setempat menyisihkan lahan, membangun sarana serta prasarana yang dibutuhkan seperti listrik, air, jalan dsb. China juga membangun jalan raya utama dari pantai Timur hingga ke Xinjiang di Barat, dan dari Utara ke wilayah Selatan guna menembus isolasi dan memfasilitasi penanaman FDI di wilayah-wilayah yang semula dianggap kurang menarik. Langkah ini diambil karena wilayah-wilayah itu memiliki aneka macam barang tambang dengan nilai ekonomis tinggi yang akan menarik minat FDI ke China.

Keunggulan produk China juga terletak pada perpaduan antara upah buruh yang kompetitif dengan *output* produk yang berteknologi sedang hingga tinggi dengan kualitas yang tinggi pula, seperti produk berbasis IT. Biasanya, negara-negara yang mengandalkan tingkat upah buruh kompetitif hanya mampu menghasilkan produk berteknologi sedang, dan tidak bisa menghasilkan produk berteknologi tinggi seperti China (Cummins, 2004).

Faktor kestabilan politik turut memberikan dukungan besar sehingga China mampu melaksanakan program pembangunan ekonomi dengan maksimal tanpa gejolak termasuk suksesi dan regenerasi kepemimpinan nasional (Tajuk *The Jakarta Post*, 6 Des 2004), selain dinamika sinergis dari berjuta-juta *overseas Chinese* yang membentuk ikatan bisnis global maupun regional dengan semangat kapitalisme berdisiplin tinggi. Sinergisme *overseas Chinese* ini tumbuh menjadi semacam bentuk hibrida, yaitu konvergensi kapitalisme China dengan kapitalisme *Anglo-American* (Yeung, 2004), yang telah mentransformasi organisasi serta bisnis kapitalisme China secara signifikan dengan memberinya energi tambahan dalam percaturan bisnis global.

Lagipula, China juga membesarkan industri nasional selain industri yang datang dari luar (FDI), bahkan telah mampu melakukan FDI ke luar China. Misalnya, industri komputer Lenovo milik China, telah mengakuisisi bisnis PC IBM

dengan nilai US \$ 1.75 milyar. Industri baja raksasa China, Shanghai Baosteel, memiliki jaringan atau *net-working* mulai dari Australia (sumber biji besi) hingga ke Jepang (pemasaran), dengan jumlah karyawan 100,000 orang dan aset US \$ 22 milyar.

Industri lain, misalnya industri telkom Huawei Technologies mampu bersaing dengan 'pemain' tingkat dunia seperti Alcatel dan Siemens dengan nilai penjualan US \$ 5 milyar (2004) dan beroperasi di 70 negara. Industri properti dan real estate China, Shimao Group, mampu secara berdikari membangun Pudong *river front* termasuk *North Bund* sebagai pusat bisnis Shanghai modern yang sangat dikenal dunia (Cummins, 2004; Wiryawan; Suparman I.A dan Wiryawan, 2004).

Industri migas terbesar ke tiga China, *China National Offshore Oil Corp/CNOOC*, sedang dalam proses meng-akuisisi perusahaan migas dari A.S, *Unocal*, dengan nilai sekitar US \$ 13 milyar. Langkah ini terkait dengan fakta bahwa kebutuhan BBM China dewasa ini lebih dari enam juta barel setiap hari dan impor BBM China meningkat dengan 40 % dalam dekade ini (*Bloomberg/The Jakarta Post*, 8 Jan, 2005)

Di bidang produk tekstil, China mengeksport US \$ 60 milyar setiap tahun dengan menggunakan label '*Made in China*' ke tiap penjuru dunia. Dengan dihapusnya perjanjian *Multi Fibre Agreement/MFA* pada akhir tahun 2004, perdagangan produk tekstil dunia tidak lagi memerlukan kuota. Sebagai akibatnya, China diperkirakan akan mendapatkan *lion share* dari pasar produk tekstil dunia senilai US \$ 350 milyar per tahun, sehingga menjadi saingan berat bagi produsen tekstil di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, terutama yang terbiasa bergantung kepada sistem kuota. Sebuah studi WTO memperkirakan bahwa pangsa pasar produk tekstil China di A.S akan naik dari 16 % menjadi 50 %, sedangkan di Uni Eropa naik dari 18 % menjadi 29 % pasca berlakunya *MFA* (Koppel, 2004). Itu sebabnya mengapa A.S berencana memberlakukan mekanisme *safeguard* sebagai peredam serbuan tekstil China.

Tabel 1 : "Global Champions China 2003"
(US \$ billion)

Company	Sector	Revenue
Petro China	Oil/gas	36.60
Sinopec	Oil/gas	51.10
CNOOC	Oil/gas	4.93
Baosteel	Steel	5.31
Chalco	Aluminium	2.80
Lenovo	P.C	2.97
SAIC	Cars	0.83
T.C.L	TV/Electronics	3.40
Haier	Household Electr.	9.70
Huawei	Telecoms	5.00
Wanxiang	Car parts	2.00

(Sumber: *The Economist*, 8 Jan 2005, hal.58)

Beberapa pemain besar global China (memiliki penjualan ekspor minimal 20 % dari total penjualan sebagai syarat sebagai pemain global) dapat dilihat dari Tabel 1:

Secara historis, keberhasilan China merupakan pengulangan sukses yang pernah dicapai China. Pada awal abad ke 18, pangsa pasar Asia terhadap PDB dunia sebesar 60% dengan China menyumbang lebih dari setengahnya. Setelah Perang Candu, dua kali Perang Dunia, disusul dengan revolusi Oktober 1949 serta kemajuan teknologi yang didominasi negara-negara Eropa dan A.S, pada tahun 1950-an pangsa pasar China terhadap PDB dunia merosot di bawah 5%. Saat ini, pangsa pasar Asia terhadap PDB dunia sekitar 38%, masih jauh dibandingkan dengan pangsa pasar 60% pada awal abad ke 18. Namun Fan Gang, Garret dan Lehmann (2005) menyatakan bahwa abad Asia makin cerah dengan China bersama-sama India menjadi bagian penting kemajuan yang akan diperoleh Asia di abad ke 21. Apabila FTA ASEAN + 3, serta kemudian dengan India terlaksana, kemungkinan prediksi Fan Gang *et al* (2005) menjadi kenyataan.

Nilai perdagangan China pada tahun 2004 mencapai lebih dari US \$ 1.1 triliun atau naik 35.7% dibandingkan tahun 2003. Angka tsb diperkirakan telah membuat China menjadi negara dengan perdagangan luar negeri terbesar ke tiga dunia setelah A.S dan Jepang, dengan melewati Jerman yang beralih menjadi nomor empat. Surplus perdagangannya China menjadi US \$ 31.98 milyar, atau

naik 25.6% dibandingkan tahun sebelumnya (*Sinar Harapan*, 12 Jan. 2005)

Walaupun FTA ASEAN-China memiliki potensi besar, dari segi Produk Domestik Bruto/PDB posisi FTA ini masih kalah dibandingkan posisi PDB NAFTA maupun PDB Uni Eropa, apalagi bila diukur dengan Produk Nasional Bruto/PNB dari NAFTA maupun Uni Eropa yang pasti berbeda dengan PDB masing-masing mengingat besarnya investasi yang dilakukan oleh NAFTA serta Uni Eropa di luar wilayah geografis masing-masing. Di pihak lain, investasi di luar wilayah yang dilakukan oleh ASEAN-China tentu belum seintensif NAFTA maupun Uni Eropa sehingga belum terlalu signifikan jumlahnya.

Demikian pula dari besarnya nilai perdagangan internasional, ASEAN-China masih kalah (lihat Tabel 2)

Peluang Indonesia Dalam F.T.A Asean-China

Pertanyaan pertama yang timbul setelah menjamurnya bermacam-macam FTA di hampir tiap region ialah: Apakah kemunculan FTA sebanyak itu menandai kegagalan dari WTO dalam menjalankan agenda globalisasi perdagangan dan jasa lewat liberalisasi sistem tataniaga sebagai misi WTO?. Aziz (2004), mengutip pendapat para pakar seperti Bergsten (mantan *Chairman* dari *APEC Eminent Persons Group*) serta Shujiro Urata (profesor *International Business* dari Waseda University, Jepang), berpendapat bahwa men-

jamurnya pembentukan FTA pada hakekatnya karena negara-negara tsb kuatir 'ketinggalan kereta'. Mereka yang tidak ikut serta merasa akan tertinggal.

Padahal, menurut Aziz (2004), data menunjukkan bahwa dari 239 buah kesepakatan *Regional Trade Agreements* yang dibuat sejak September 2001 (100 buah dibuat setelah kesepakatan Putaran Uruguay tahun 1995), hanya 162 saja yang bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2002. Selanjutnya tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah masing-masing (terutama pemerintah yang memiliki pengaruh besar secara internasional) apakah akan diteruskan atau digantung sebagai hiasan saja. Dari sudut pandang inilah Aziz (2004:6) mengingatkan "the next assignment for Indonesia is to be meticulous in determining which agreement is substantial and which one is prestigious in name only". Dengan kata lain, Indonesia harus 'pandai meniti buih' seperti kata pepatah Melayu, memilih apa-apa yang bermanfaat saja.

Berdasarkan data WTO, saat ini terdapat sekitar 150 buah FTA dengan 80 buah lagi sedang dinegosiasikan, sehingga pada tahun 2007 diperkirakan akan ada 300 FTA. Berlainan dengan WTO yang secara standar bersifat global dan non-diskriminatif, FTA biasanya amat diskriminatif terhadap non-anggota FTA, demikian menurut Stuart Harbinson, seorang petinggi WTO (*Agence France-Presse/The Jakarta Post*, Nov 22, 2004). Masih menurut Harbinson, bila FTA ASEAN-China (ditambah Jepang dan Korea Selatan) terlaksana, A.S diperkirakan

akan kehilangan ekspor senilai US 25 milyar, dan perdagangan dunia kemudian terpecah menjadi tiga pusat (*tripolar*), yaitu Amerika, Uni Eropa dan Asia, sehingga menghambat kinerja maupun proses perdagangan global seperti dicita-citakan oleh WTO.

Lagipula, walaupun sudah masuk *ranah* politik dan bukan lagi *ranah* ekonomi, percaturan geo-politik global maupun regional tidak terhindarkan ikut memberikan warna, yang akan menentukan langkah selanjutnya dari pelaksanaan FTA. Sebagai contoh, keputusan China untuk memberikan status *early harvest* kepada ASEAN sedini mungkin bagi negara-negara ASEAN yang sudah siap (contoh: Thailand dengan produk hortikultur), segera diikuti oleh India yang juga menawarkan program *early harvest* walau secara formil India belum memastikan akan ikut FTA ASEAN, semata-mata karena secara politis India tak ingin ketinggalan dari China.

Di pihak lain, kesediaan China untuk ikut serta dalam FTA ASEAN antara lain karena secara politis China tidak ingin pengaruh Jepang dalam 'merebut kursi tambahan' anggota tetap Dewan Keamanan PBB membesar. China ingin agar kursi wakil Asia itu kelak diberikan kepada India dan bukan kepada Jepang yang dianggap China telah 'berhutang darah' kepada China akibat agresi pasukan Jepang menjelang Perang Dunia ke II.

Peristiwa tragis yang dikenal dalam sejarah dengan "*The Nanjing Massacre*" membawa korban 300,000 orang terbunuh serta ratusan ribu perempuan Nanjing (di bagian Timur propinsi Jiangsu)

diperkosa pasukan Jepang dalam bulan Desember 1937. Walaupun Jepang berusaha keras 'menebus dosa' dengan memberikan bantuan *official development assistance/ODA* mulai tahun 1970an sampai dengan April 2004 senilai US \$ 29.8 milyar kepada China., namun Beijing berkeras bahwa kehormatan perempuan Nanjing tidak mungkin diganti dengan uang senilai berapapun juga.

Sebagai catatan, kursi anggota tambahan Dewan Keamanan dari Asia itu diidam-idamkan oleh India, Jepang dan Indonesia, sedang China sudah lama menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sehingga tidak perlu memperebutkan lagi.

Secara politis pula, Australia, walaupun ingin ikut serta dalam FTA ASEAN, merasa ragu-ragu karena kuatir mengganggu pakta persahabatannya (atau pakta pertahanan bersamanya?) dengan A.S selama ini. Sebagaimana diketahui, para penandatangan FTA ASEAN + 3 juga menandatangani dokumen *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC* yang diikuti pula oleh Rusia dan India serta kelak oleh Selandia Baru. Sekiranya Australia bersedia ikut, mungkin Malaysia bakal merasa kurang senang, sebagai buah sengketa politik lama antara Malaysia dengan Canberra sejak Mahatir Mohamad masih berkuasa. Diam-diam, ASEAN sebenarnya juga memendam rasa kuatir bila kelak FTA ASEAN + 3 dikuasai oleh *The Group of Three from North East Asia*, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan (Kavi Chongkittavorn, 2004)

Dalam hal politik, ASEAN nampak tidak kalah taktis karena telah mengikat China untuk menandatangani zona damai bebas nuklir, yang menjadi bagian dari usaha memelihara stabilitas kawasan. Diharapkan bahwa FTA ASEAN-China menjadi katalis mendorong integrasi ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur yang damai.

Bagi Indonesia, FTA ASEAN-China memberikan peluang yang cukup banyak selain, tentunya, kekuatiran yang biasa menyertai setiap langkah besar dalam ekonomi dan politik sebuah bangsa. Pertama-tama, pertanyaannya ialah seberapa jauh keseriusan Indonesia ikut serta dalam perdagangan bebas? (Aziz,

Tabel 2: "Perbandingan antara FTA ASEAN-China dengan 3 FTA lainnya"

F.T.A	Negara anggota	Populasi (juta)	PDB (US\$ milyar)	PDB (Kapita/US\$)	Impor & Ekspor (US\$ milyar)
ASEAN-China	11	2,037.11	2,096.2	1,029	1,608.7
Uni Eropa	25	379.74	10,482.7	27,605	4,752.1
NAFTA	3	453.90	12,342.1	29,043	7,709.2
MERCOSUR (Amerika Latin)	4	224.0	639.1	2,853	150.2

(Sumber: ASEAN Japan Center)

2004). Sebab, untuk benar-benar mampu melaksanakan perjanjian yang berdampak besar, diperlukan pemerintah yang kuat dan efisien untuk meredam gejolak masyarakat jika timbul dampak negatif.

Dengan mengambil contoh Singapura, pemerintah Indonesia harus serius menghilangkan semua hambatan perdagangan barang dan jasa, ekonomi biaya tinggi akibat KKN, sekaligus juga memperkuat hak-hak kaum buruh serta menjaga kelestarian lingkungan (Aziz, 2004), yang menjadi tantangan buat Indonesia. Untuk menjaga harga produk tetap kompetitif, seringkali pemerintah 'menekan' tingkat upah minimum sehingga buruh merasa kurang disejahterakan. Pemerintah seringkali gamang bila menghadapi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sementara MNCs (kasus Buyat!) karena kuatir tindakan tegas akan mengganggu iklim investasi.

Selanjutnya, masalah yang juga memerlukan penanganan serius ialah pendanaan infrastruktur. Indonesia membutuhkan paling kurang US \$ 72 milyar untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun yad, sehingga mengajak dunia internasional bergabung membentuk semacam *Indonesian Infrastructure Fund/ IIF* yang direncanakan dilakukan awal tahun 2005 (*Kompas*, 30 Nop.2004). Infrastruktur yang memadai perlu disediakan atau dibangun guna memudahkan alur logistik, suplai produksi, sarana komunikasi, jalanraya, pelabuhan samudra, maupun fasilitas pendukung lain untuk kelancaran pengiriman produk yang akan diekspor.

Selain persoalan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan masalah penting lain yang mesti segera ditangani. SDM Indonesia dinilai sangat rendah kualitas kerjanya bila dibandingkan dengan negara lain. Seorang pekerja China sama nilai produktivitasnya dengan empat orang Indonesia, dan seorang pekerja India nilai produktivitasnya sama dengan dua orang pekerja Indonesia (*Media Indonesia*, 30 Des.2004). Mengingat pelaksanaan FTA ASEAN-China masih lama prosesnya, tersedia cukup waktu untuk melakukan pembenahan SDM yang dibutuhkan sebagai persiapan.

Setiap negara harus melakukan persiapan yang memadai sebelum dapat berperan aktif dalam FTA. Thailand telah lama mempersiapkan diri dengan konsentrasi di bidang produk pertanian hortikultur bernilai tinggi sehingga mereka segera siap memetik manfaat berupa *early harvest* yang diberikan China. Akibatnya, kini di Beijing tersedia buah-buahan asal Thailand seperti durian dsb dengan harga cukup murah.

Singapura memilih untuk menyiapkan diri di bidang *financial services* sebagai produk unggulan sambil menyiapkan basis produk manufaktur mereka di Batam (!), sehingga dengan lincah memasuki FTA bukan saja dengan China, bahkan dengan A.S dan Peru yang secara geografis berada sangat jauh. Persiapan seperti telah dilakukan Thailand dan Singapura memang tidak mudah, namun mutlak diperlukan. Porter (1990:76) menyatakan bahwa "to succeed, innovation usually requires pressure, necessity, even adversity: the fear of loss proves more powerful than hope of gain". Ketakutan akan kekalahan harus dijadikan sumber energi untuk mengubahnya menjadi tenaga peraih sukses, demikian Porter (1990), sebagai hal yang seyogyanya dilakukan juga oleh Indonesia.

Sekiranya segala sesuatu telah disiapkan, peluang ekonomi tampak menjanjikan bagi Indonesia untuk menerima manfaat FTA tsb. Kekhawatiran bahwa Indonesia akan tertinggal dan menjadi 'korban' memang ada. Pengalaman menunjukkan adanya semacam persaingan ketat, bahkan juga secara internal bila FTA dilakukan. Uni Eropa misalnya, mengalami fenomena dimana truk-truk angkutan dari Yunani leluasa melintasi jalan-jalan di Belgia dan Jerman membawa keju atau produk lainnya. Saat NAFTA diberlakukan, serikat buruh AS marah karena merasa pekerjaan mereka akan beralih ke Mexico sebagai bagian dari negara NAFTA yang memiliki tingkat upah lebih murah. Jadi, merupakan fenomena umum bila ada pihak yang 'menang' dan ada yang 'tertinggal' dalam sistem ekonomi neo-liberalis yang menggejala di balik arus deras globalisasi dewasa ini (Sritua Arief, 2001)

Kekhawatiran Indonesia bakal kebanjiran produk murah yang berasal dari China memang beralasan. Cuma, hendaknya disadari bahwa dengan ataupun tanpa FTA ASEAN-China, produk China tak bisa begitu saja dihambat tanpa kemungkinan terkena sanksi WTO, ataupun sanksi berupa retaliiasi dari China atas produk unggulan ekspor Indonesia ke negara tsb. Tambahan, produk China yang murah sebenarnya bermanfaat pula dalam memberikan peluang bagi pedagang kecil (asongan) untuk ramai-ramai menjual produk China di kaki-lima dsb, karena dalam kesulitan ekonomi saat ini sebagian besar rakyat Indonesia amat membutuhkan produk dengan harga murah yang terjangkau. Dari segi konsumsi, produk China memenuhi kebutuhan konsumen rakyat kecil selain memberikan peluang kerja.

Banjirnya produk tekstil China serta kekhawatiran akan semakin kehilangan pangsa pasar bagi industri manufaktur tekstil Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri sudah diperkirakan sejak dahulu, mengingat jangkawaktu perjanjian *MFA* perdagangan tekstil internasional dengan sistem kuota hanya selama 30 tahun (1974-2004). Kenyataannya, industri manufaktur tekstil Indonesia seolah-olah tidak menghiraukan seruan itu, antara lain dari pemerintah, yang menganjurkan agar mereka segera melakukan pembenahan melalui restrukturisasi permesinan agar bisa menghasilkan produk dengan target kelas menengah atas yang bebas kuota, maupun pengalihan pasar ke negara-negara non-kuota seperti Jepang, Afrika, Timur Tengah dsb. Tanpa maksud mencari kesalahan, peringatan demi peringatan berlalu tanpa kerja nyata pembenahan diri, dan tahu-tahu penghapusan kuota mulai diberlakukan awal tahun 2005. Sesungguhnya, 30 tahun merupakan waktu yang cukup panjang bagi industri tekstil Indonesia guna menyiapkan diri memasuki era non-kuota.

Dampak masuknya produk China sebenarnya bukan saja terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun sampai ke negara-negara maju. A.S pun merasakannya, tidak saja untuk

produk seperti tekstil bahkan merambah ke sektor industri berteknologi tinggi dengan *skilled labour* yang bersifat *capital-intensive*. *High-tech industries* yang terkena misalnya industri semi-konduktor yang semula dikira akan kebal terhadap serbuan produk China (*Agence France-Presse/The Jakarta Post*, 13 Jan 2005).

Kesimpulan dan Diskusi

Yang pertama dan utama bagi Indonesia ialah agar dengan sangat serius mempersiapkan diri, sebab bukan waktunya lagi memperdebatkan manfaat ataupun mudharatnya globalisasi sejak Suharto menyatakan di pertemuan APEC di Bogor tahun 1994: "Suka atau tidak suka, siap atau tidak, Indonesia akan memasuki zaman globalisasi". Sesungguhnya, globalisasi memberi peluang buat Indonesia, baik sendirian maupun bersama ASEAN untuk meraih manfaat tsb.

Secara makro-ekonomi, FTA ASEAN-China membuka kesempatan dalam lima tahun mendatang bagi ASEAN untuk menjadi mitra dagang China terbesar ke dua. Status tsb di masa lalu membuat makmur warga Amerika Utara serta Uni Eropa. Hanya lewat pertumbuhan ekonomi yang memadai, kemiskinan yang masih melanda wilayah Asia Pasifik (dengan jumlah penduduk miskin sekitar satu milyar) bisa disejahterakan, sebagaimana telah dicanangkan oleh PBB dalam pro-

gram *Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan abad Milenium* sebagai misi PBB dalam soal pemberantasan kemiskinan global.

Pada tataran mikro-ekonomi, paling tidak terdapat peluang memasarkan komoditi Indonesia, misalnya karet alam. Kebutuhan China akan karet alam meningkat pesat bila dibandingkan dengan kebutuhan pasar tradisional Indonesia selama ini seperti AS dan Uni Eropa. Dengan munculnya China sebagai lokasi industri otomotif pindahan (relokasi) dari AS, Eropa, dan bahkan Jepang, industri otomotif ini menyerap 76% hasil karet alam dunia. China akan memproduksi 10 juta kendaraan bermotor dan 98 juta buah ban dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Ekspor karet Indonesia ikut mengalami kenaikan berturut-turut dari 46,000 ton (2002) menjadi 106,000 ton (2003), dengan tahun 2004 diperkirakan mencapai 160,000 ton.

Produksi karet alam Indonesia sebesar 1.79 juta ton tahun 2003; 91 % diekspor dengan perincian 55 % diekspor ke Amerika Utara, 17 % ke Uni Eropa, 20% ke Asia Timur sedangkan sisanya ke negara-negara lain. Sebagai negara peng-ekspor terbesar ke dua dunia setelah Thailand, Indonesia menghasilkan sekitar 2.0 juta ton per tahun. Harga karet di pasar internasional juga baik, bahkan naik menjadi US\$ 120.64 sen/Kg dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar US \$ 100.41

sen/Kg. Akibat kenaikan harga minyak yang merupakan bahan dasar karet sintesis, diperkirakan kebutuhan karet alam bertambah, dan tingkat harga diprediksi mencapai kenaikan sekitar 21% tahun 2005. Komoditi karet alam menjadi contoh kongkrit yang dapat ditawarkan Indonesia sebagai mata dagang unggulan. Tentunya masih banyak lagi yang lain, yang takkan muncul ke permukaan sekiranya tidak di "paksa" (Porter, 1990).

Bidang lain yang dapat ditawarkan Indonesia ialah bidang turisme, khususnya untuk turis China. Indonesia sejauh ini menerima sekitar 80,000 turis asal China, padahal Singapura berhasil memperoleh 700,000 turis pada tahun 2003. Perbedaan ini amat menyolok, karena setiap tahun sekitar 10 juta orang China melakukan perjalanan internasional, dengan separuhnya (5 juta) menjadi turis ke mancanegara. Jika Indonesia menjalankan program kerjasama, misalnya dengan *Singapore Tourism Board*, menawarkan paket program kunjungan bersama ke Singapura-Indonesia, kemungkinan turis asal China akan meningkat lumayan (Leony Aurora, 2005)

Pembukaan konsulat RI di Guangzhou baru-baru ini, dan segera di Shanghai, yang dilakukan otoritas pariwisata RI cukup menjanjikan. Selama 10 bulan pertama tahun 2004 jumlah turis yang datang di Indonesia berjumlah 3.8 juta dengan pemasukan sebesar US \$ 3.9 milyar (target tahun 2004: 5.3 juta turis, pemasukan US\$5 milyar). Turis asal China dapat merupakan target tambahan bagi usaha promosi pariwisata Indonesia selanjutnya.

Apapun langkah yang dilakukan Indonesia, yang menjadi kata kunci ialah: mempersiapkan keunggulan daya saing. Keunggulan ini tidak semata-mata teknologi tinggi saja, namun di segala bidang di mana pihak/negara lain kekurangan sedang Indonesia berkelimpahan. Contohnya ialah karet alam serta turisme itu yang dibutuhkan dunia karena tidak bisa disediakan oleh negara industri maju sekaliber AS, Uni Eropa, Jepang dsb. Kemudian, perlu dilakukan pula promosi yang serius serta tidak asal-asalan saja. Karet alam serta turisme merupakan contoh usaha nyata yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pelaku-pelaku industri di



Pemerintah Indonesia harus serius menghilangkan semua hambatan perdagangan barang & Jasa, untuk menjaga harga produk tetap kompetitif

kedua sub-sektor dengan hasil baik. Tentu terdapat pula sub-sektor lain dengan kinerja baik di Indonesia, yang bekerja keras serta efisien sehingga mereka siap mengambil manfaat FTA.

Secara makro, Indonesia perlu berusaha menembus pasar non-tradisional sebagai terobosan, berikut dukungan pembiayaan ekspor yang murah sehingga mengurangi *cost of fund* yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Semua negara kini berlomba-lomba memberikan kemudahan untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor, termasuk negara-negara maju seperti A.S yang memberikan kredit ekspor bagi pembelian pesawat buatan Boeing dari Chicago, serta Uni Eropa yang memberikan juga fasilitas kredit ekspor bagi pembelian pesawat Airbus mereka.

Sudah barang tentu, kesempatan akan mengecil, bahkan sirna, jikalau pihak/negara lain merasa kurang nyaman membeli apapun dari Indonesia akibat korupsi yang menimbulkan biaya tinggi. Atau turis yang batal berkunjung karena alasan keamanan. Dengan begitu, Indonesia harus sungguh-sungguh bekerja keras menghilangkan korupsi, ketidakpastian hukum, terorisme/kekerasan fisik lain, serikat pekerja yang terlalu militan meminta upah tinggi namun produktivitas kerjanya rendah, infrastruktur yang asal-asalan tanpa kualitas memadai dsb. Masalah-masalah inilah yang menghambat kemajuan perdagangan internasional Indonesia, yang menyebabkan investasi asing enggan masuk serta turis mancanegara menjauh ketakutan, bukan FTA. Menko Perekonomian Aburizal Bakri secara tegas menyatakan bahwa aparat pemerintah menghambat proses investasi dengan memberikan penjelasan yang berbeda dengan peraturan yang sudah ada (*Sinar Harapan*, 12 Jan 2005).

Impian FTA biasanya berupa manfaat kesempatan kerja, kenaikan pendapatan, harga yang lebih bersaing, kesejahteraan rakyat yang meningkat. Impian ini berlaku timbal-balik dan tidak hanya sepihak saja. Kesempatan tidak akan datang dua kali, sebab China pun – dalam mengejar impiannya—ternyata

juga menoleh ke Amerika Latin sebagai sumber daya alam alternatif industri China mengingat produk Amerika Latin kurang lebih serupa dengan Indonesia seperti minyak mentah, biji besi dan barang tambang lain, hasil bumi, serta juga pembangunan infrastruktur seperti tenaga listrik dll. Selama ini China telah

meng-impor sebesar US \$ 10.7 milyar produk dari Brazil, Argentina dan Chili. Kalau Indonesia hanya merasa ketakutan saja, "Time and tide wait for no man", Indonesia akan tertinggal di landasan pacu. Inovasi dan efisiensi yang mesti diperjuangkan, bukan hanya rasa takut terhadap FTA. **U**

KEPUSTAKAAN

- Agence France-Presse/The Jakarta Post. 2004. Regional trade pacts threaten global trade talks: WTO. 22 Nop, hal.16
- _____ 2005. Rising US deficit with China "impacting" high-tech industries. 13 Jan, hal.16
- Aziz. 2004. APEC Summit 2004 and regional trade arrangements. *The Jakarta Post*, 23 Nop, hal.6
- Bhagwati, JN & Srinivasan, TN. 1979. Trade policy and development. Dalam R. Dorn-busch dan J.A. Frenkel, eds, *International economic policy: theory and evidence*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Bloomberg/The Jakarta Post. 2005. No comment on takeover bid: CNOOC. 8 Jan, hal.15
- Cardoso, FH & Falletto, E. 1970. *Dependency and development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Cummins, Kath. 2004. China: opening the golden door to investors. *Forbes*, 20 Des, hal. 1 – 7.
- Diaz-Alejandro, CF. 1975. Trade policies and economic development. Dalam P.B Kenen, ed, *International trade and finance: frontiers for research*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dos Santos, T. 1973. The crisis of development theory and the problem of dependence in Latin America. Dalam H. Bernstein, ed, *Under development and development*. Harmondsworth: Penguin.
- Fan Gang; Garrett, Michael & Lehmann, Jean-Pierre. 2005. Asia's post-tsunami future. *The Jakarta Post*, 7 Jan, hal. 6
- Garten, Jeffrey E. 2004. China: the missing member at the G-8 table. *The Jakarta Post*, 8 Juni, hal.7
- Griffin, Richard W & Pustay, Michael W. 2002. *International business*. Prentice-Hall Int.
- Harmsen, Peter. 2004a. China, ASEAN move toward world's biggest FTZ. *Agence France-Presse/The Jakarta Post*, 30 Nop, hal. 3
- _____ 2004b. Chinese investment still strong despite economic tightening. *The Jakarta Post*, 17 Des, hal. 16
- Hill, Charles WL. 2003. *International business*. McGraw-Hill International edition.
- Hrvoje Hranski. 2004. East Asia's economies to grow more than 7%. WB. *Associated Press/The Jakarta Post*. 10 Nop, hal.16
- Ivy Susanti. 2004. Why an integrated Asia is a cock-and-bull story. *The Jakarta Post*, 28 Des, hal. 17
- Kartadjoemena, HS. 1996. *GATT dan WTO, sistem, forum dan lembaga internasional dibidang perdagangan*. Jakarta: UI Press.
- Kavi Chongkittavorn. 2004. Which country is calling the shots in East Asia? *The Nations/The Jakarta Post*, 7 Des, hal. 7.
- Kompas. 2004. Pemerintah ajak ASEAN ikut bentuk "Infrastructure Fund". 30 Nop, hal 1 dan 11

- Koppel, Naomi. 2004. The worldwide label of the future: made in China. *Associated Press/The Jakarta Post*, 23 Des, hal. 16
- Leony Aurora. 2005. Govt sets tourism 2005 target on China, India, Mideast. *The Jakarta Post*, 3 Jan, hal. 13
- Media Indonesia. 2004a. SBY harus prioritaskan pembangunan SDM. 30 Des, hal. 32
- _____ 2004b. Kebijakan "Safeguard" AS peluang bagi Indonesia. 24 Des, hal 2
- Ohn Ki-Un. 2004. Arah kerjasama ekonomi Asia Timur Laut. *Kompas*. 2 Juni, hal. 4
- Ong Keng Yong. 2004. ASEAN Summit: continuing the dynamism. *The Jakarta Post*. 22 Nop, hal.7
- Porter, Michael E. 1990. *The competitive advantage of nations*. New York: The Free Press.
- Prebisch, R. 1959. Commercial policy in the underdeveloped countries. *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 49, 251-256
- Robock, Stefan H; Simmonds, Kenneth & Zwick, Jack. 1977. *International business and multinational enterprises*. Homewood, Ill: Richard D. Irwin
- Sinar Harapan. 2005. Nilai perdagangan Cina 2004 capai US \$ 1.1 triliun. 12 Jan, hal. 4
- _____ 2005. Aparat pemerintah hambat proses investasi. 12 Jan, hal 4.
- Smith, Adam. 1986 (asli tahun 1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Bungay, Suffolk: Penguin Classics.
- Sritua, Arief. 2001. *IMF/Bank Dunia dan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumitro Djohadikusumo. 1991. *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- The Economist*. 2005. Special Report, China champions. 8 Jan, hal. 58.
- The Jakarta Post*. 2004. Tajuk: China's might. 6 Des, hal. 6.
- Tongzon, Jose T. 2002. *The economies of Southeast Asia*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
- Wiryawan, Nizam Jim. 2004. AFTA + 3: the likely impacts to ASEAN of the China's accession to the expanded Free Trade Area. *USAHAWAN*, Juli, hal. 50-56
- _____ & Wiryawan, Zahrida Z. 2003. From ASEAN Free Trade Area (AFTA) to ASEAN Economic Community (AEC) by the year 2020: the creation of a Single Common Market?. *Jurnal Ekonomi*. Nop, hal. 135-144
- Wiryawan, NJ; Suparman IA & Wiryawan, ZZ. 2005. Career success orientations: an empirical study of the Indonesian women business executives. Penelitian untuk Program Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara di Jakarta. Belum dipublikasi.
- Yanuar Nugroho. 2002. Reinventing globalization. *The Jakarta Post*. 30 Des, hal. 14
- Yeung, Henry Wai-Chung. 2004. *Chinese capitalism in a global era*. New York: Routledge.



Lembaga Management

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM PELATIHAN EKSEKUTIF

Workshop Pengelolaan Hubungan Industrial (7 - 9 Juni 2005)

Taktik dan teknik berunding dengan serikat pekerja dalam PHI & Penyusunan PKB.
Biaya Investasi Rp. 2.750.000,- / orang

Workshop Manajemen Risiko Pajak (22 - 23 Juni 2005)

Identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko pajak dalam bisnis perbankan serta mengintegrasikan risiko pajak dalam sistem manajemen risiko perbankan
Biaya Investasi Rp.2.500.000,- / orang

Workshop Analisis Efektivitas Pelatihan (22 - 23 Juni 2005)

Teknik Evaluasi Pelatihan dan Perhitungan Return on Training Investment (ROTI).
Biaya Investasi Rp. 1.750.000,- / orang

Workshop Sistem Pengukuran Kinerja Cabang Perusahaan (28 - 30 Juni 2005)

Perencanaan mengenai definisi, proses dan penerapan DEA untuk mengukur kinerja perusahaan
didukung dengan modelan dan simulasi DEA.
Biaya Investasi Rp. 2.500.000,- / orang



Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Lembaga Management FEUI - Bag. Training, Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Website : www.lmfeui.com Telp. 021-3907410 / 021-31934142 Ext.139/140, Fax. 021-31931610
HP. 0818-08308879 / 0812-9847948, Att. Henry / Rina / Fian